



**LAPORAN EVALUASI  
RENCANA KERJA  
TRIWULAN I  
TAHUN 2025**

**DINAS PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT DAN DESA  
KOTA DENPASAR**

---

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa/ Ida Sang Hyang Widhi Wasa atas Asung Kerta Wara Nugrahanya Dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa / Ida Sang Hyang Widhi Wasa maka penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Kinerja Hasil Rencana Kerja (Renja) Triwulan I Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar dapat disusun dan diselesaikan sebagaimana yang diharapkan.

Laporan Pengendalian dan Evaluasi Kinerja Hasil Rencana Kerja (Renja) Triwulan I Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar Tahun Anggaran 2025 diharapkan dapat dipergunakan sebagai pedoman bagi penyusunan dokumen perencanaan daerah dan perangkat daerah serta menjadi bagian dari upaya untuk mewujudkan sinergi langkah-langkah kebijakan, program/kegiatan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kota Denpasar.

Kami sadar bahwa laporan ini sangat sederhana dan masih banyak kekurangan. Demi kelancaran program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar pada masa yang akan datang, kami berharap masukan dan saran yang sifatnya membangun untuk perbaikan dan kebaikan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar.

Denpasar, 9 April 2025  
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat  
dan Desa Kota Denpasar



**I Wawan Budha, S.IP., M.A.P**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 197007151992011001

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi .....	ii
<b>BAB I. Pendahuluan .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan .....	3
1.4 Metodeologi.....	3
1.5 Sistematika Penulisan.....	4
<b>BAB II. Rencana Kinerja 2025 .....</b>	<b>5</b>
2.1 Anggaran Belanja.....	5
2.2 Target Indikator Kinerja Utama (IKU).....	5
2.3 Perjanjian Kinerja .....	6
2.4 Target Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2025.....	8
<b>BAB III. Evaluasi Terhadap Hasil Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</b>	
3.1 Kota Denpasar Tahun Anggaran 2025.....	12
3.2 Evaluasi Terhadap Hasil Rencana Kerja Perangkat Daerah.....	13
3.3 Hambatan dan Kendala dalam Pencapaian Target Kinerja yang Telah Ditetapkan	30
<b>BAB IV. Penutup .....</b>	<b>31</b>

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Rencana Kerja (Renja) merupakan penjabaran awal daripada rencana strategis (Renstra) Perangkat Daerah untuk periode 1(satu) tahun. Pada Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar yang memberikan gambaran tentang program dan kegiatan yang akan dikerjakan oleh perangkat Daerah dalam satu tahun anggaran untuk menjawab pertanyaan apa yang menjadi tujuan, sasaran peningkatan pelayanan, target capaian kinerja, serta sebagaimana program dan pelayanan perangkat daerah sesuai tupoksinya.

Sebagai dokumen rencana tahunan yang merupakan penjabaran Perangkat daerah, Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar mempunyai arti yang Strategis dalam mendukung penyelenggaraan Program tahunan Pemerintah Daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Rancangan Rencana Kerja merupakan acuan Perangkat Daerah untuk memasukan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2025.
3. Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program / kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercatat dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun 2025.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, telah dibentuk tim penyusun Laporan Evaluasi Hasil Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar Tahun 2025.

Tim yang dibentuk telah melakukan evaluasi yang meliputi realisasi pencapaian target kegiatan, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi. Evaluasi Renja yang dilakukan bertujuan untuk melihat perkembangan hasil pelaksanaan Renja dan keselarasan antara RKPD dengan Renja serta memberikan panduan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan OPD Lainnya dalam menyusun rancangan kebijakan.

Evaluasi Rencana Kerja triwulan I Tahun Anggaran 2025 didasarkan kepada pencapaian kinerja pembangunan sampai dengan kondisi 31 Maret 2025. Sebagai dokumen evaluasi perencanaan pembangunan tahunan selama tahun berjalan, diharapkan hasil evaluasi ini dapat menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun 2026.

## **1.2 Landasan Hukum**

Penyusunan Laporan Evaluasi Hasil Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar Tahun Anggaran 2025, Laporan Evaluasi Hasil Renja Triwulan I dilandasi dasar hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana kota Denpasar Tahun 2021-2026 (Tambahan lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 5).

### 1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari Evaluasi Hasil Renja Tahun 2025 adalah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian target rencana program dan kegiatan prioritas daerah, sebagaimana tercantum dalam Renja Tahun 2025, guna :

1. Menilai daya serap capaian target kinerja program/kegiatan, mencakup masukan (*input*), keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) yang telah ditetapkan dalam dokumen Renja dan RKPD Tahun 2025 dan RPJMD Tahun 2021- 2026.
2. Mengetahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian Renja Perangkat Daerah, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan dimasa yang akan datang.
3. Memperoleh gambaran capaian target kinerja dan pendanaan Renja Tahun 2025.
4. Merumuskan rekomendasi dan saran tindak lanjut untuk dipergunakan sebagai masukan dalam peningkatan kinerja pembangunan daerah.

#### 1.4 Metodeologi

Metodeologi yang digunakan dalam pelaksanaan penyusunan Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah ini yaitu dengan menghitung capaian kinerja program dan kegiatan dengan menggunakan kategori interval nilai realisasi kinerja program dan kegiatan sampai dengan triwulan berkenaan. Penggunaan kategori interval ini akan membantu pengklasifikasian penilaian realisasi kinerja program dan kegiatan berdasarkan target rencana program dan kegiatan prioritas daerah. Kategori interval yang digunakan adalah sebagai berikut :

Kriteria Penilaian dan Interval Nilai Realisasi Kinerja Evaluasi Hasil Rencana Kerja Perangkat Daerah

No.	Kriteria Penilaian	Simbol	Interval Nilai
1	Sangat Tinggi	ST	91% ≥ 100%
2	Tinggi	T	76% ≤ 90 %
3	Sedang	S	66% ≤ 75%
4	Rendah	R	51% ≤ 65%
5	Sangat Rendah	SR	≤ 50%

#### 1.5 Sistematika Penulisan

Laporan Evaluasi Hasil Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar Anggaran 2025 kondisi Triwulan I disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- BAB I : Pendahuluan, mencakup Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, Metodeologi serta Sistematika Penulisan Laporan Evaluasi Hasil Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar Tahun Anggaran 2025.
- BAB II : Rencana Kinerja 2025, berisi penjelasan singkat mengenai rencana kinerja yaitu target IKU, perjanjian kinerja, rencana kinerja program-kegiatan-sub kegiatan dengan alokasi anggaran tahun 2025.

BAB III : Evaluasi Terhadap Hasil Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kota Denpasar Tahun Anggaran 2025, menjelaskan tentang Evaluasi Terhadap Hasil Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Hambatan/Kendala Dalam Pencapaian Target Kinerja Yang Telah ditetapkan.

BAB IV : Penutup

**BAB II**  
**RENCANA KINERJA 2025**

**2.1 Anggaran Belanja**

Pada tahun 2025 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar mendapat belanja daerah baik belanja Operasi maupun belanja Modal sejumlah Rp. 11,474,294,591,- setelah pergeseran 1 T.A 2025 Untuk lebih jelasnya dapat dilihat Pada Tabel berikut ini :

**Tabel 2.1 Anggaran Belanja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun Anggaran 2025**

URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH/ BERKURANG
	Sebelum Pergeseran	Sesudah Pergeseran III	
<b>BELANJA DAERAH</b>			
<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>Rp 13.848.566.474,-</b>	<b>Rp 11.425.179.591,-</b>	<b>Rp 0,-</b>
Belanja Pegawai	Rp 6.703.762.846,-	Rp 5.530.729.963,-	Rp 0,-
Belanja Barang dan Jasa	Rp 7.144.803.628,-	Rp 5.894.449.628,-	Rp 0,-
<b>BELANJA MODAL</b>	<b>Rp 49.115.000,-</b>	<b>Rp 49.115.000,-</b>	<b>Rp 0,-</b>
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp 49.115.000,-	Rp 49.115.000,-	Rp 0,-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 13.897.681.474,-</b>	<b>Rp 11.474.294.591,-</b>	<b>Rp 0,-</b>

**2.2 Target Indikator Kinerja Utama (IKU)**

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan tolak ukur keberhasilan organisasi secara menyeluruh dan menggambarkan tugas, peran dan fungsi organisasi tersebut. Sebagai langkah utama untuk menilai keberhasilan pelaksanaan kinerja organisasi maka perlu dilaporkan Indikator Kinerja yang paling utama atau disebut dengan IKU dari beberapa indikator yang ada. Capaian IKU diharapkan secara proporsional dapat memberikan gambaran sejauh mana organisasi dapat mencapai kinerjanya.

Tujuan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar adalah Meningkatkan Kualitas Kemandirian Desa. Untuk mencapai tujuan tersebut, terdapat 2 (dua) indikator kinerja yaitu Indeks Desa Membangun (IDM) dan Indeks Profil Desa. Indeks Desa Membangun (IDM) pada tahun 2025 dengan target sebesar 0.98 dan pada indikator Indeks Profil Desa pada tahun 2025 dengan target sebesar 0.77.

### 2.3 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja ditetapkan untuk memenuhi amanat Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar telah membuat Perjanjian Kinerja Tahun 2025 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsi. Adapun Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar Tahun 2025 dapat dilihat dalam tabel 2.2 dibawah:

**Tabel 2.2**  
**Perjanjian Kinerja Kepala Dinas**  
**Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar**  
**Tahun 2025**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Mengoptimalkan Kemandirian Desa dan Desa Swasembada yang Berkelanjutan	Indeks Desa Membangun	0.980
		Profil Desa	0.770

Program		Anggaran		Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	8.573.642.591	
2	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Rp.	38.567.000	
3	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Rp.	741.883.000	
4	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Rp.	2.120.202.000	
<b>Total Anggaran</b>		<b>Rp.</b>	<b>11,474,294,591</b>	

Sasaran Strategis “Mengoptimalkan Kemandirian Desa dan Desa Swasembada yang Berkelanjutan” mengukur perkembangan Status/Klarifikasi Desa Kota Denpasar yaitu Desa Mandiri atau Desa Swasembada. Pengukuran tersebut didiskripsikan melalui pengukuran Indeks Desa Membangun (IDM) dan Indeks Profil Desa. Dimana Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar melaksanakan kegiatan pengembangan di dalamnya. Dalam pelaksanaannya Sasaran Strategis didukung oleh 3 (tiga) program, 3 (tiga) kegiatan dan 13 (tiga belas) sub kegiatan, antara lain:

## **1. Program Peningkatan Kerja Sama Antar Desa**

Indikator : Jumlah Kerjasama yang terbentuk

Target : 100 %

Sasaran strategis ini mengukur pertumbuhan Desa yang melakukan Kerja sama di Kota Denpasar. Dimana Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar melaksanakan Kegiatan Fasilitasi Kerja sama antar Desa didalamnya.

Dalam pelaksanaannya didukung oleh 1 (satu) Sub Kegiatan, yaitu :

- a) Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota

Sasaran ini merupakan upaya untuk menjawab permasalahan: kurangnya jejaring dan kerja sama antar desa dalam menciptakan pusat pertumbuhan baru di perdesaan.

## **2. Program Administrasi Pemerintahan Desa**

Indikator : Presentase Desa yang Tertib Administrasi

Target : 100 %

Pengukuran tersebut didiskripsikan melalui persentase evaluasi perkembangan desa, dengan maksud bahwa dengan mengetahui perkembangan desa, maka diharapkan bisa untuk mempertahankan dan memperkuat upaya pencapaian sasaran pembangunan desa dan kawasan perdesaan. Dimana Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar melaksanakan Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa didalamnya.

Dalam pelaksanaannya didukung oleh 6 (enam) sub kegiatan, antara lain:

- a) Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
- b) Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
- c) Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa
- d) Fasilitasi Penyusunan Profil Desa
- e) Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa
- f) Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa & Kelurahan

Sasaran ini merupakan upaya untuk menjawab permasalahan belum optimalnya kinerja aparatur dan kelembagaan pemerintahan desa di dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

### **3. Program Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat**

Indikator : Presentase Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) aktif

Target : 100 %

Sasaran Strategis mengukur tingkat partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan di desa. Pengukuran tersebut didiskripsikan melalui persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang aktif dalam peran serta pembangunan. Dalam arti bahwa kemandirian desa tidak dapat tercapai hanya dari kualitas dan kuantitas pembangunan saja, tetapi juga melibatkan Lembaga Masyarakat Desa yang kuat. Dimana Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar melaksanakan Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat didalamnya.

Dalam pelaksanaannya didukung oleh 6 (enam) Sub Kegiatan antara lain:

- a) Fasilitas Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
- b) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
- c) Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa
- d) Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
- e) Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat
- f) Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga

Sasaran ini merupakan upaya untuk menjawab permasalahan melemahnya tingkat partisipasi lembaga kemasyarakatan desa dan melemahnya kohesi sosial masyarakat dalam proses pembangunan desa.

#### **2.4. Target Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2025**

Adapun target kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar sebagai berikut:

**Tabel 2.3 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2025**

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN				INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES) KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET TAHUN 2025		
						K	Rp	
1	2				3	4	5	
	Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar						11,474,294,591	
	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa						11,474,294,591	
2	13	01			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Persentase pemenuhan layanan sekretariat</b>	<b>100</b>	<b>8,573,642,591</b>
					<b>KEGIATAN</b>			
2	13	01	2.02		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>100</b>	<b>5,530,729,963</b>
					<b>SUB KEGIATAN</b>			
2	13	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100	5,530,729,963
					<b>KEGIATAN</b>			
2	13	01	2.06		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>100</b>	<b>358,537,400</b>
					<b>SUB KEGIATAN</b>			
2	13	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	100	7,785,000
2	13	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100	244,753,600
2	13	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	100	67,838,800
2	13	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	100	13,140,000
2	13	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100	25,020,000
					<b>KEGIATAN</b>			
2	13	01	2.07		<b>Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Terpenuhinya Pengadaan Barang Milik Daerah</b>	<b>100</b>	<b>49,115,000</b>
					<b>SUB KEGIATAN</b>			
2	13	04	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	100	49,115,000
					<b>KEGIATAN</b>			
2	13	01	2.08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100</b>	<b>2,003,568,228</b>
					<b>SUB KEGIATAN</b>			
2	13	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100	171,000,000
2	13	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100	1,832,568,228

NO					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES) KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET TAHUN 2025	
							K	Rp
1					2	3	4	5
					<b>KEGIATAN</b>			
2	13	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemangkas Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah	100	631,692,000
					<b>SUB KEGIATAN</b>			
2	13	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinasnya	100	329,232,000
2	13	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	100	5,000,000
2	13	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100	72,760,000
2	13	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100	224,700,000
					<b>PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA</b>	<b>Jumlah Kerjasama yang terbentuk</b>	<b>100</b>	<b>38,567,000</b>
					<b>KEGIATAN</b>			
2	13	03	2.01		Fasilitasi Kerjasama antar Desa	Jumlah desa yang mendapatkan pembinaan kerjasama	100	38,567,000
					<b>SUB KEGIATAN</b>			
2	13	03	2.01	01	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	100	38,567,000
					<b>PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>Presentase Desa yang Tertib Administrasi</b>	<b>100</b>	<b>741,883,000</b>
					<b>KEGIATAN</b>			
2	13	04	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	- Jumlah Desa yang mendapat Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa - Jumlah Bundes yang aktif	100	741,883,000
					<b>SUB KEGIATAN</b>			
2	13	04	2.01	03	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	100	348,848,000
2	13	04	2.01	04	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan Bundes dan Lembaga Kerjasama antar desa	100	45,841,000
2	13	04	2.01	08	Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan Bundes dan Lembaga Kerjasama antar desa	100	38,025,000
2	13	04	2.01	11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa	100	32,494,000
2	13	04	2.01	13	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Aset Desa	100	34,762,000
2	13	04	2.01	18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lamba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lamba Desa dan Kelurahan	100	241,913,000

NO					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES) KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET TAHUN 2025	
							K	Rp
1					2	3	4	5
2	13	05			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT</b>	-Presentase Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) aktif -Presentase Pasar Desa dengan fasilitasi yang baik	100	2.120.202,000
					<b>KEGIATAN</b>			
2	13	05	2.01		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelaksana Hukum Adat yang sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	- Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang Aktif - Jumlah Pasar Desa dengan Fasilitasi yang baik	100	2.120.202,000
					<b>SUB KEGIATAN</b>			
2	13	05	2.01	02	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat.	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	100	3.235,000
2	13	05	2.01	03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	100	73.680,000
2	13	05	2.01	05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	100	134.051,000
2	13	05	2.01	06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	100	58.128,000
2	13	05	2.01	07	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	100	55.314,000
2	13	05	2.01	09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	100	1.775.794,000

Dari tabel diatas ini dapat diketahui bahwa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar pada Tahun 2025 melaksanakan 4 Program dan 8 Kegiatan 26 Sub Kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp 11,474,294,591,-.

### BAB III

#### EVALUASI TERHADAP HASIL RENCANA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KOTA DENPASAR TAHUN ANGGARAN 2025

##### 3.1. Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Utama Triwulan I Tahun 2025

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai dengan pendataan yang dilakukan sampai dengan Triwulan I dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel 3.1 Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Utama Triwulan I Tahun 2025**

No	Indikator Kinerja Utama	Target Kinerja Tahun 2025	Realisasi s.d Triwulan I	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Indeks Desa Membangun	0,98	-	IDM adalah Indeks komposit yang dibentuk dari Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi Desa ( Permendesa, PDIT Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun )
2	Indeks Profil Desa	0,77	-	Potensi desa dan kelurahan terdiri atas data sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana (Permendagri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan)

Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar sesuai tabel diatas dapat kita lihat bahwa Realisasi Kinerja pada Triwulan I sudah mencapai target. IKU Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar dapat dilihat dari keberhasilan Program dan Kegiatan yang mendukung Indikator Kinerja Utama dengan 4 Program, 8 Kegiatan dan 26 Sub Kegiatan dengan rata rata capaian kinerja 7.34% dengan interval nilai Sangat Rendah.

### **3.2. Evaluasi Terhadap Hasil Rencana Kerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Triwulan I**

Pelaksanaan evaluasi ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra SKPD, serta mengetahui hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Berikut ini akan diuraikan mengenai kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar Triwulan I Tahun Anggaran 2025 serta progres pencapaian kinerja dalam Renstra periode 2021- 2026 sehingga dapat teridentifikasi sampai sejauh mana Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar telah melaksanakan program dan kegiatannya.

Realisasi keuangan sampai dengan 31 Maret 2025 (Triwulan I) ini sebesar Rp 2,033,965,116,- dengan persentase capaian keuangan 15.77 % (sangat rendah) dan capaian kinerja sebesar 7.34 % (sangat rendah) sesuai dengan tabel berikut ini :

**Tabel 3.2 Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Subkegiatan  
Triwulan I Tahun 2025**

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES) KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET TAHUN 2025		REALISASI S/D TRIWULAN I TAHUN 2025		Keterangan
			K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar			11,296,572,430	7.34	2,033,965,116	
	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			11,296,572,430	7.34	2,033,965,116	
2	13	01					
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA KEGIATAN</b>	<b>Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan</b>	100	8,464,582,780	15.68	1,523,248,497	
2	13	01	2.02				
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Presentase Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	100	5,420,782,128	35.19	932,681,084	
	<b>SUB KEGIATAN</b>						
2	13	01	2.02	01			
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100	5,420,782,128	35.19	932,681,084	
	<b>KEGIATAN</b>						
2	13	01	2.06				
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Presentase Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	100	304,983,500	18.01	76,451,000	
	<b>SUB KEGIATAN</b>						
2	13	01	2.06	01			
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	100	4,734,000	22.95	1,787,000	
2	13	01	2.06	02			
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100	206,601,500	24.10	58,979,400	

NO					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES) KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET TAHUN 2025		REALISASI S/D TRIWULAN I TAHUN 2025		Keterangan
							K	Rp	K	Rp	
1					2	3	4	5	6	7	8
2	13	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	100	48,112,000	18.34	12,444,600	
2	13	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	100	13,140,000	24.66	3,240,000	
2	13	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100	32,396,000	-	0,00	
					<b>KEGIATAN</b>						
2	13	01	2.07		<b>Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Presentase Terpenuhinya Pengadaan Barang Milik Daerah</b>	100	54,000,000	0.00	-	
					<b>SUB KEGIATAN</b>						
2	13	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	100	54,000,000	-	-	
					<b>KEGIATAN</b>						
2	13	01	2.08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Presentase Terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	100	2,289,401,152	19.67	441,165,613	
					<b>SUB KEGIATAN</b>						
2	13	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100	165,600,000	16.83	28,777,779	
2	13	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100	2,123,801,152	22.50	412,387,834	
					<b>KEGIATAN</b>						
2	13	01	2.09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Presentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah</b>	100	395,416,000	5.54	72,950,800	
					<b>SUB KEGIATAN</b>						

NO					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES) KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET TAHUN 2025		REALISASI S/D TRIWULAN I TAHUN 2025		Keterangan
							K	Rp	K	Rp	
1					2	3	4	5	6	7	8
2	13	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	100	298.296,000	22.16	72,950,800	
2	13	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	100	5,000,000	-	0.00	
2	13	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100	74,020,000	-	0.00	
2	13	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100	18,100,000	-	-	
2	13	03			<b>PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA KEGIATAN</b>	<b>Jumlah Kerjasama yang terbentuk</b>	<b>100</b>	<b>7,537,000</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
2	13	03	2.01		<b>Fasilitasi Kerjasama antar Desa</b>	<b>Jumlah desa yang mendapatkan pembinaan kerjasama</b>	<b>100</b>	<b>7,537,000</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
					<b>SUB KEGIATAN</b>						
2	13	03	2.01	01	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	100	7,537,000	-	0.00	
2	13	04			<b>PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA KEGIATAN</b>	<b>Presentase Desa yang Tertib Administrasi</b>	<b>100</b>	<b>631,608,650</b>	<b>9.82</b>	<b>27,861,980</b>	
2	13	04	2.01		<b>Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa</b>	<b>- Jumlah Desa yang mendapat Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintah Desa - Jumlah Bumdes yang aktif</b>	<b>100</b>	<b>631,608,650</b>	<b>9.82</b>	<b>27,861,980</b>	
					<b>SUB KEGIATAN</b>						
2	13	04	2.01	01	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	100	159,191,000	0.26	900,000	

NO					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES) KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET TAHUN 2025		REALISASI S/D TRIWULAN I TAHUN 2025		Keterangan
							K	Rp	K	Rp	
1					2	3	4	5	6	7	8
2	13	04	2.01	04	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan Bumdes dan Lembaga Kerjasama antar desa	100	29,916,800	57.67	26,436,980	
2	13	04	2.01	08	Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan Bumdes dan Lembaga Kerjasama antar desa	100	114,517,000	-	-	
2	13	04	2.01	11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa	100	48,610,750	0.92	300,000	
2	13	04	2.01	13	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Aset Desa	100	34,762,000	-	-	
2	13	04	2.01	18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	100	393,414,550	0.09	225,000	
2	13	05			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT KEGIATAN</b>	-Presentase Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) aktif -Presentase Pasar Desa dengan fasilitasi yang baik	100	2,033,653,000	3.86	257,860,000	
2	13	05	2.01		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	- Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang Aktif- Jumlah Pasar Desa dengan Fasilitasi yang baik	100	2,033,653,000	3.86	257,860,000	
					<b>SUB KEGIATAN</b>						

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN					INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES) KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET TAHUN 2025		REALISASI S/D TRIWULAN I TAHUN 2025		Keterangan
							K	Rp	K	Rp	
1	2					3	4	5	6	7	8
2	13	05	2.01	02	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat.	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	100	16,840,000	-	0,00	
2	13	05	2.01	03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	100	73,680,000	-	0,00	
2	13	05	2.01	05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	100	102,309,000	0,29	450,000	
2	13	05	2.01	06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	100	12,075,000	-	0,00	
2	13	05	2.01	07	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	100	63,779,000	-	0,00	
2	13	05	2.01	09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	100	1,838,650,000	22,89	257,410,000	

Tabel 3.3 Form Evaluasi Rencana Kerja Triwulan I Tahun 2025

## Formulir E.81

## Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kota Denpasar

## Renja Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar

Periode Pelaksanaan : Triwulan I Tahun 2025

Indikator dan Target Kinerja Perangkat Daerah Kota Denpasar yang mengacu pada sasaran RKPd :

Indeks Desa Membangun : 0.98

Indeks Profil Desa : 0.77

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021 - 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu (n-3)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir tahun pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				(Tahun 2026)		(Tahun 2024)		(Tahun 2025)		1										
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
1	2	3	4	5		6		7		8		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100%		14 = 6+12		15 = 14/5x100%		16
1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	100	13,190,357,840	100	9,734,068,696	100	8,573,642,591	15,68	1,523,248,497	15,68	1,523,248,497	15,68	17,77	28,92	11,257,317,193	17,35	85,35	DPMD
1.1		KEGIATAN																		
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhi nya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	8,387,971,222	100	6,375,707,275	100	5,530,729,963	35,19	932,681,084	35,19	932,681,084	35,19	16,86	33,80	7,308,388,359	20,28	87,13	DPMD

	<b>SUB KEGIATAN</b>																		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1 0 0	8,383,578,922	10 0	6,375,707,275	10 0	5,530,729,963	35.19	932,681,084	35.19	932,681,084	35.19	16.86	31.80	7,308,388,359	20.28	87.18	DPMD
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 0 0	4,392,300	0	-	10 0	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-	DPMD
<b>1</b>	<b>KEGIATAN</b>																		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 0 0	539,074,601	10 0	409,416,500	10 0	358,537,400	18.01	76,451,000	18.01	76,451,000	18.01	21.32	29.50	485,867,500	17.70	90.13	DPMD
	<b>SUB KEGIATAN</b>																		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 0 0	7,421,757	10 0	4,734,000	10 0	7,785,000	22.95	1,787,000	22.95	1,787,000	22.95	22.95	30.74	6,521,000	18.44	87.86	DPMD
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 0 0	259,161,178	10 0	206,601,500	10 0	244,753,600	24.10	58,979,400	24.10	58,979,400	24.10	24.10	31.02	265,580,900	18.61	102.48	DPMD
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 0 0	59,326,664	10 0	48,112,000	10 0	67,838,800	18.34	12,444,600	18.34	12,444,600	18.34	18.34	29.59	60,596,600	17.75	107.07	DPMD
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1 0 0	51,565,602	10 0	13,140,000	10 0	13,140,000	24.66	3,240,000	24.66	3,240,000	24.66	24.66	31.16	16,380,000	18.70	31.77	DPMD
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Koresultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 0 0	161,600,000	10 0	136,829,000	10 0	25,020,000	-	0.00	0.00	-	0.00	0.00	25.00	136,829,000	15.00	84.67	DPMD
<b>1</b>	<b>KEGIATAN</b>																		
	Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Presentase Terpenuhinya Pengadaan Barang Milik Daerah	1 0 0	8,724,570,354	10 0	120,603,000	10 0	49,115,000	0.00	-	0.00	-	0.00	-	25.00	120,603,000	15.00	1.38	DPMD

	Pemerintah Daerah																		
	SUB KEGIATAN																		
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	1 0 0	197.946,3 20	10 0	120.603,0 00	10 0	49.115,000	-	-	0,00	-	0,0 0	-	25 00	120.603,0 00	15 00	60,9 3	DPMD
1	KEGIATAN																		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Terpenuhi Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 0 0	3.517,938 707	10 0	2.250,025 921	10 0	2.003,568,228	19,67	441,165,61 3	19,67	441,165,6 13	19, 67	22,02	29, 92	2,491,191, 534	17, 95	76,8 0	DPMD
	SUB KEGIATAN																		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 0 0	166,028,9 40	10 0	165,600,0 00	10 0	171.000,000	16,83	28,777,779	16,83	28,777,77 9	16, 83	16,83	29, 21	194,377,7 79	17, 52	117, 07	DPMD
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 0 0	3.331,909, 767	10 0	2.084,425 921	10 0	1.832,568,228	22,50	412,387,83 4	22,50	412,387,8 34	22, 50	22,50	30, 63	2,406,813, 755	18, 38	74,4 9	DPMD
2	KEGIATAN																		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah	1 0 0	745,373,3 10	10 0	578,316,0 00	10 0	631,692,000	5,54	72,950,800	5,54	72,950,80 0	5,5 4	11,55	26, 38	651,266,8 00	15, 83	87,3 7	DPMD
	SUB KEGIATAN																		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perotangan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinan	1 0 0	586,501,6 65	10 0	298,206,0 00	10 0	329,232,000	22,16	72,950,800	22,16	72,950,80 0	22, 16	22,16	30, 54	371,246,8 00	18, 32	63,2 9	DPMD
	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	1 0 0	7,613,320	10 0	5,000,000	10 0	5,000,000	-	0,00	0,00	-	0,0 0	0,00	25, 00	5,000,000	15, 00	65,6 7	DPMD
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin	1 0 0	112,369,6 75	10 0	74,020,00 0	10 0	72,760,000	-	0,00	0,00	-	0,0 0	-	25, 00	74,020,00 0	15, 00	65,8 7	DPMD

		Lainnya yang Dipelihara																	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 0 0	38,798,650	10 0	201,000,000	10 0	224,700,000	-	-	0,00	-	0,00	-	25,00	201,000,000	15,00	518,06	DPMD
2		<b>PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA</b>	1 0 0	21,961,500	10 0	7,537,000	10 0	38,567,000	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	25	7,537,000	15,00	34,32	DPMD
2.1		<b>KEGIATAN</b>																	
		Fasilitasi Kerjasama antar Desa	1 0 0	21,961,500	10 0	7,537,000	10 0	38,567,000	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	25	7,537,000	15,00	34,32	DPMD
		<b>SUB KEGIATAN</b>																	
		Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	1 0 0	21,961,500	10 0	7,537,000	10 0	38,567,000	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	25,00	7,537,000	15,00	34,32	DPMD
		Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	1 0 0	61,492,200	10 0	0,00	10 0	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	15,00	0,00	DPMD
3		<b>PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA</b>	1 0 0	2,602,476,350	10 0	1,151,725,650	10 0	741,883,000	9,82	27,861,980	9,82	27,861,980	9,82	3,76	27,46	1,179,587,630	16,47	45,33	DPMD
3.1		<b>KEGIATAN</b>																	
		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	1 0 0	2,602,476,350	10 0	1,151,725,650	10 0	741,883,000	9,82	27,861,980	9,82	27,861,980	9,82	3,76	27,46	1,179,587,630	16,47	45,33	DPMD

		Bundes yang aktif																		
		<b>SUB KEGIATAN</b>																		
		Facilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	1 0 0	232,925,0 00	10 0	283,853,0 00	10 0	348,848,000	0,26	900,000	0,26	900,000	0,2 6	0,26	25 06	284,753,0 00	15 04	122 25	DPMD
		Facilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa	1 0 0	58,051,56 5	10 0	102,560,8 00	10 0	45,841,000	57,67	26,436,980	57,67	26,436,98 0	57, 67	57,67	39 42	128,997,7 80	23 65	222 21	DPMD
		Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	1 0 0	175,000,0 00	10 0	45,149,55 0	10 0	-	-	0,00	0,00	-	0,0 0	-	25 00	451,495,50 00	15 00	25,8 0	DPMD
		Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan Bundes dan Lembaga Kerjasama antar desa	1 0 0	58,564,00 0	10 0	362,197,0 00	10 0	38,025,000	-	-	0,00	-	0,0 0	0,00	25 00	362,197,0 00	15 00	618 46	DPMD
		Facilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa	1 0 0	73,205,00 0	10 0	48,610,75 0	10 0	32,494,000	0,92	300,000	0,92	300,000	0,9 2	0,92	25 23	48,910,75 0	15 14	66,8 1	DPMD
		Facilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Aset Desa	1 0 0	117,128,0 00	0	0,00	10 0	34,762,000	-	-	0,00	-	0,0 0	0,00	0,0 0	-	0,0 0	-	DPMD
		Facilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	1 0 0	512,435,0 00	10 0	309,354,5 50	10 0	241,913,000	0,09	225,000	0,09	225,000	0,0 9	0,09	25 02	309,579,5 50	15 01	60,4 1	DPMD
		Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	1 0 0	1,608,092, 785	0, 00	0,00	0, 00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,0 0	0,00	0,0 0	0,00	DPMD
4		<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAK</b>	Presentase Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) aktif	1 0 0	3,721,934, 400	10 0	4,425,468 ,600	10 0	2,120,202,000	3,86	257,860,00	3,86	257,860,0 00	3,8 6	12,16	25, 97	4,683,328, 600	15, 58	125, 83	DPMD

	AT HUKUM ADAT																		
4.1	KEGIATAN																		
	Pembertayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pembertayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pembertayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	- Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang Aktif - Jumlah Pasar Desa dengan Fasilitas yang baik	1 0 0	3,721,934, 400	10 0	4,425,468, 600	10 0	2,120,202,000	3.86	257,860,000	3.86	257,860,000	3.86 6	13.16	25.97	4,683,328, 600	15.88	125.83	DPMD
	SUB KEGIATAN																		
	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	1 0 0	352,981,200	10 0	16,840,000	10 0	3,235,000	-	0.00	0.00	-	0.00	-	25.00	16,840,000	15.00	4.77	DPMD
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat	1 0 0	109,807,500	10 0	249,415,000	10 0	73,680,000	-	0.00	0.00	-	0.00	-	25.00	249,415,000	15.00	227.14	DPMD

	Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya																					
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	1 0 0	153.730,5 00	10 0	477.629,0 00	10 0	154.051,000	0,29	430.000	0,29	450.000	0,2 9	0,29	25, 07	478.079,0 00	15, 04	310, 99		DPMD			
	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 0 0	58.564,00 0	10 0	26.828,00 0	10 0	58.128,000	-	0,00	0,00	-	0,0 0	0,00	25, 00	26.828,00 0	15, 00	45,8 1		DPMD			
	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	1 0 0	46.851,20 0	10 0	63.779,00 0	10 0	55.314,000	-	0,00	0,00	-	0,0 0	-	25, 00	63.779,00 0	15, 00	136, 13		DPMD			
	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1 0 0	3.000,000, 000	10 0	3.590,977 600	10 0	1.775.794,000	22,89	257.410,00 0	22,89	257.410,0 00	22, 89	14,50	30, 72	1.848.387, 600	18, 43	128, 28		DPMD			
Rata-rata capaian kinerja (%)											7,34												
Predikat kinerja											SANGAT RENDAH												
Faktor pendukung keberhasilan kinerja:																							
1	Adanya regulasi/acuan-acuan dan lain-lain yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan																						
2	Adanya komunikasi, kerjasama, yang baik antara DPMD dan Desa sehingga pembinaan dan pendampingan yang dilakukan dapat berjalan dengan baik																						
Faktor Penghambat:																							
1	Adanya perubahan jadwal kegiatan menyebabkan proses realisasi berjalan lewat dari anggaran kas yang seharusnya																						
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya **: memantau rencana anggaran kas, agar sesuai dengan target yang ditetapkan																							



Tabel 3.4 Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan pada Triwulan I TA. 2025



KEGIATAN	FOTO KEGIATAN
<b>BIDANG 1                      BIDANG PEMERINTAHAN DESA</b>	
<p><b>KEGIATAN :</b>                      BIMBINGAN TEKNIS                      SISKEUDES TAHUN                      2025</p> <p><b>TANGGAL :</b>                      26 FEBRUARI 2025</p>	
<p><b>KEGIATAN :</b>                      PEMBINAAN LOMBA                      DESA DAN                      KELURAHAN TINGKAT                      KOTA (TAHAP I)</p> <p><b>TANGGAL :</b>                      3 MARET – 6 MARET                      2025</p>	



**KEGIATAN :**  
MONITORING DAN  
EVALUASI  
ADMINISTRASI  
PEMERINTAHAN DESA

**TANGGAL :**  
10 MARET – 14 APRIL  
2025



KEGIATAN	FOTO KEGIATAN
<p data-bbox="792 176 938 211" style="text-align: center;"><b>BIDANG 2</b></p> <p data-bbox="391 211 1339 246" style="text-align: center;"><b>BIDANG PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN EKONOMI DESA</b></p> <p data-bbox="240 251 483 376"><b>KEGIATAN :</b> MOITORING DAN EVALUASI PASAR DESA</p> <p data-bbox="240 408 464 505"><b>TANGGAL :</b> 23 JANUARI – 14 MARET 2025</p>	
<p data-bbox="240 1206 444 1303"><b>KEGIATAN :</b> LOMBA PASAR DESA</p> <p data-bbox="240 1335 444 1432"><b>TANGGAL :</b> 24 MARET – 27 MARET 2025</p>	



KEGIATAN	FOTO KEGIATAN TW I
----------	--------------------

**BIDANG 3**  
Bidang Keswadayaan dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa

Kegiatan : Rapat Rutin Tp.Pkk  
Kota/Kecamatan/Desa/Keluraha  
n  
Tanggal : Kamis,30 Januari  
2025



Kegiatan : Rapat Posyandu  
Paripurna Lansia, Balita, Ibu  
Hamil Dan Kader Posyandu  
Tahap 1  
Tanggal : Rabu 5 Februari  
2025



Kegiatan : Pembukaan  
Posyandu Paripurna, Balita,  
Ibu Hamil, Lansia Dan Kader  
Posyandu Tahap 1 Tahun  
2025, BR PULUGAMBANG,  
KEL PEGUYANGAN

Tanggal : Kamis 13 Februari  
2025





Kegiatan : Pembukaan  
Posyandu Paripurna, Balita,  
Ibu Hamil, Lansia Dan Kader  
Posyandu Tahap 1 Tahun  
2025, BR KAYUMAS KAJA,  
KEL DANGIN PURI

Tanggal : Jumat, 14 Februari  
2025



Kegiatan : PEMBUKAAN  
POSYANDU PARIPURNA,  
BALITA, IBU HAMIL, LANSIA  
DAN KADER POSYANDU  
TAHAP 1 TAHUN 2025, BR  
KEPISAH, KEL PEDUNGAN

Tanggal : Sabtu, 15 Februari  
2025



Kegiatan : PEMBUKAAN  
POSYANDU PARIPURNA,  
BALITA, IBU HAMIL, LANSIA  
DAN KADER POSYANDU  
TAHAP 1 TAHUN 2025, BR  
KERTHA DHARMA, KEL  
PEMECUTAN

Tanggal : Senin, 17 Februari  
2025



Kegiatan : PEMBUKAAN  
POSYANDU PARIPURNA,  
BALITA, IBU HAMIL, LANSIA  
DAN KADER POSYANDU  
TAHAP 1 TAHUN 2025, BR  
TATASAN KAJA, KEL TONJA

Tanggal : Selasa, 18 Februari  
2025



Kegiatan : PEMBUKAAN  
POSYANDU PARIPURNA,  
BALITA, IBU HAMIL, LANSIA  
DAN KADER POSYANDU  
TAHAP 1 TAHUN 2025, BR  
PAANG KAJA, KEL PENATIH

Tanggal : Rabu, 19 Februari  
2025



Kegiatan : Medharmayatra  
Lansia

Tanggal : 11-12 Maret 2025





### **3.3 Hambatan Dan Kendala Dalam Pencapaian Target Kinerja Yang Telah ditetapkan**

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan ketidakcapaian pelaksanaan visi, misi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Dalam hal pencapaian target kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar memiliki hambatan dan kendala-kendala, sebagaimana yang diuraikan dibawah ini :

1. Proses dalam pembelian barang dari Penyedia memakan waktu yang lama, karena memakai E-Katalog V.6 sehingga kegiatan lambat untuk direalisasikan
2. Beberapa peserta Bimtek dan Monev datang terlambat hadir karena kondisi hujan atau macet
3. Beberapa Anggota Tim terlambat hadir karena kondisi hujan atau macet
4. Pada kegiatan Posyandu Paripurna dimana angka sasaran ibu hamil pada salah satu lokasi posyandu paripurna yang tidak mencapai target disebabkan angka ibu hamil yang Kecil
5. Pada Kegiatan Posyandu Paripurna melihat angka kelahiran yang mulai bertambah pada beberapa lokasi posyandu terdapat jumlah balita yang mengalami peningkatan

## BAB IV PENUTUP

Laporan pengendalian dan evaluasi kinerja hasil Rencana Kerja (Renja) ini bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian Misi dan juga merupakan landasan penilaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar. Hasil evaluasi ini diharapkan dapat dipertanggungjawabkan serta dapat diimplementasikan ke dalam kinerja yang lebih baik.

Keberhasilan program – program pembangunan ini akan sangat bergantung pada komitmen pimpinan beserta jajarannya serta didukung dengan etos kerja yang tinggi dibarengi dengan disiplin ilmu sesuai dengan tugas yang diemban dalam upaya peningkatan capaian kinerja untuk mencapai sasaran dan tujuan yang sebagaimana yang telah ditetapkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar.

Demikian laporan evaluasi kinerja hasil Rencana Kerja (Renja) Triwulan I ini dibuat dalam rangka pertanggung jawaban tugas dan fungsi serta hasil–hasil yang dicapai maupun kegagalan–kegagalan yang dihadapi akan menjadi pedoman dan instropeksi bagi kami dalam pelaksanaan tugas kedepan.

Denpasar, 9 April 2025  
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat  
dan Desa Kota Denpasar



**I Wayan Budha, S.IP., M.A.P**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 197007151992011001